

**MUSLIM SALEH ATAU RADIKAL:
Prospek Toleransi Agama di Indonesia Pasca 2-12**

Imron Rosidi

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau
imronrosidi@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan tentang prospek toleransi beragama di Indonesia setelah peristiwa demonstrasi umat Islam pada tanggal 02 Desember 2016 (2/12), dengan sudut pandang pada peningkatan kesalehan atau radikalisme pemahaman. Berdasarkan tulisan ini, gerakan aksi bela Islam yang puncaknya terjadi pada tanggal 2 Desember 2016 di lapangan Monas itu adalah gejala kesalehan yang hybrid dengan kapitalisme, politik dan budaya populer. Aksi itu menjadi contoh sempurna perkawinan antara kapitalisme dan Islam sebab aksi itu dimanfaatkan sebagai wahana penting mempromosikan produk-produk tertentu seperti sebuah produsen busana Muslim terkenal yang sengaja mengirimkan pesan melalui SMS ke konsumen dengan menawarkan produk diskon sekian persen dengan brand “promo Aksi Bela Islam jilid III”. Ia juga berkelindan dengan politik sebab sebagaimana diberitakan di media mainstream, aksi itu telah dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk saluran atau alat menggulingkan kekuasaan pemerintahan sekarang.

Kata Kunci : *Muslim, Radikalisme dan Toleransi*

Pendahuluan

Pada tanggal 2 Desember 2016, ratusan ribu kaum Muslim berkumpul di lapangan Monas, Jakarta. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kedatangan mereka tidak lepas dari imbas komentar Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama di Kepulauan Seribu yang menyinggung umat Islam. Ahok berkomentar dengan menggunakan ayat al-Qur'an yang pada gilirannya menciptakan protes dari sebagian ulama dan tokoh politik. Protes tersebut kian menguat seiring arus informasi yang cepat

dan dinamis melalui media televisi dan internet.

Lautan manusia pada saat peristiwa itu yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia mencerminkan bahwa wacana Islam dalam konteks Indonesia perlu dikaji kembali; apa makna dibalik peristiwa tersebut dalam konteks yang lebih luas? Apakah peristiwa 212 itu merupakan gerakan menguatnya dimensi kesalehan atau radikalisme di Indonesia? Jika itu adalah signal menguatnya gerakan radikalisme, apakah hal tersebut mengancam toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia atau tidak?

Radikalisme, Kesalehan dan Toleransi

Sebelum masuk ke pembahasan utama, penting kiranya dalam artikel ini dijelaskan istilah radikalisme, toleransi dan kesalehan. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Depdiknas RI, 2008 :1151-52), istilah radikalisme memiliki setidaknya tiga makna yakni (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik. Dari tiga terminologi tersebut, pengertian kedua agaknya lebih tepat digunakan untuk menjelaskan gejala radikalisme agama di Indonesia dan beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya. Kelompok muslim radikal memiliki kecenderungan kuat untuk melakukan perubahan sosial dan politik Islam dengan berbagai cara, bahkan dengan kekerasan sekalipun. Makna radikalisme dengan demikian memiliki nuansa negative.

Berbeda dengan radikalisme, kesalehan (*piety*) tidak bermakna negative bahkan ia memiliki nilai-nilai humanisme yang bisa digunakan untuk menangkang radikalisme. Kesalehan dalam Islam menurut Pipensky (2016 : 6) adalah Muslim yang percaya dan mengamalkan atau menjalankan rukun Islam, yaitu membaca syahadat, melaksanakan shalat, melakukan Puasa di bulan Ramadhan, membayar Zakat, dan menunaikan Haji ke tanah suci jika mampu. Walaupun

begitu, istilah kesalehan juga dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah seperti mengaji al-Qur'an, bersedekah, menolong sesama dan perilaku-perilaku sosial yang baik lainnya. Definisi kesalehan yang disampaikan oleh Pipensky di atas, diakui sendiri olehnya, sangat relatif dan bisa diperdebatkan. Ia bahkan mengatakan bahwa kesalehan memiliki empat asumsi (Pipensky, 2016 : 4) : (1) *Piety is a property of individual* (Kesalehan adalah masalah privat) (2) *Piety is unobservable* (Kesalehan tidak bisa diobservasi) (3) *Piety is multifaceted* (Kesalehan adalah beranekaragam) (4) *Piety is apolitical* (Kesalehan adalah apolitis).

Kesalehan sulit diobservasi sebab ia berkaitan dengan tingkat devosi keislaman dan keimanan yang terpusat dalam batin. Namun, Pipensky sekali lagi berpandangan bahwa ukuran kesalehan seorang Muslim bisa dilihat dari pelaksanaan rukun Islam. Hal ini dikarenakan rukun Islam bersifat wajib yang tak dibatasi oleh geografi dan budaya di mana seorang Muslim tinggal. Mazhab dan aliran Islam yang *mainstream* mengakui rukun Islam tersebut sebagai kewajiban yang harus diyakini dan diimplementasikan oleh seorang Muslim.

Sementara menurut James T. Siegel penggunaan istilah toleransi adalah terkait dengan “ ‘to endure’ or ‘to bear with’”. Perbedaan ditanggapi sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan penuh katabahan dan kesabaran. Hal ini dikarenakan toleransi membutuhkan energi yang kokoh untuk berbagai ujian perbedaan yang mungkin setiap waktu

timbul. Dalam konteks Indonesia, menjaga toleransi beragama adalah kewajiban bagi seluruh warga Negara. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah diuji dengan berbagai macam krisis beragama bahkan konflik beragama, mulai dari kasus penistaan agama hingga konflik antar agama di Poso. Yang terbaru adalah kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Thahaja Purnama atau Ahok. Kasus Ahok ini merupakan salah satu batu ujian bagi toleransi beragama masyarakat Indonesia. Apalagi Ahok merupakan representasi dari kelompok minoritas di Indonesia, baik dari segi suku dan agama.

Radikalisme Agama versus Kesalehan Agama

Kesalehan dan radikalisme adalah dua istilah yang berbeda makna. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kesalehan merupakan istilah yang tidak statis atau *fixed*. Ia cenderung sangat lentur tergantung pada kondisi social dan budaya juga tergantung pada mazhab dan aliran sekaligus juga tergantung pada penafsiran sumber-sumber otoritatif seperti Ulama dan teks-teks keagamaan. Namun, radikalisme lebih mudah diidentifikasi sebab dampaknya sangat cepat terlihat dan cenderung minoritas dalam konteks Islam Indonesia.

Secara historis, kedatangan Islam ke Indonesia tidak melalui cara-cara radikal. Bahkan, islamisasi ke Nusantara sebagaimana dikatakan oleh Uka Tjandrasmita (2009 :21) adalah saling menguntungkan bagi masing-masing pihak, yakni bagi orang Muslim yang

datang menyebarkan Islam dan orang-orang yang menerima Islam. Islamisasi di Indonesia atau Nusantara tidak pernah disebutkan oleh ahli sejarah melalui peperangan. Uka menyebutkan bahwa Islam datang ke Nusantara melalui setidaknya enam jalur; perdagangan, perkawinan, birokrasi, pendidikan (pesantren), sufisme dan seni.

Dengan demikian watak dan karakter Islam di Indonesia adalah bertipologi tidak radikal dan cenderung kadangkala, dalam bahasa Geertz, sinkretis. Beatty juga berpendapat “syncretism refers to a dynamic, recursive process, a constant reproduction, rather than to a settled outcome. Such processes are, of course, historically situated. However, their relation to the past, to some extent, is not clear.” (Sinkretisme adalah sebuah proses yang dinamis dan berulang sekaligus reproduksi konstan. Proses seperti itu tentu saja secara historis memiliki konteks. Namun, hubungannya dengan masa lalu tidak jelas) Namun istilah sinkretisme ketika digunakan untuk menjelaskan fenomena keagamaan Islam di Indonesia nampaknya kurang tepat. Sebagaimana budaya, agama manapun di dunia memerlukan unsur lain untuk menjadi sempurna. Sehingga dalam cultural studies, sebuah budaya apapun di dunia ini tidak ada yang *pure*, atau murni. Hal ini tentu bertentangan dengan penganut paham essentialist yang mengatakan bahwa ada budaya yang murni. Di sini tidak ada maksud untuk menjelaskan bahwa budaya adalah sama dengan agama namun sebagai gambaran bahwa agama memiliki hubungan dengan

unsur lain. Islam sendiri diturunkan kepada Muhammad SAW bertugas menyempurnakan agama-agama samawi lainnya. Tidak heran jika praktek ritual dalam ibadah Haji sebenarnya adalah ritual yang pernah dilakukan oleh Ibrahim AS dan istrinya, Hajar.

Namun seiring terjadinya interaksi dengan dunia global akibat dari globalisasi, tipologi Islam Indonesia yang damai mulai sedikit terurai. Hal ini terlihat dengan kemunculan kelompok-kelompok agama yang cenderung agak radikal seperti FPI, Hizbrur Tahrir dan Laskar Jihad. Padahal dalam konteks global, radikalisme agama telah menyebabkan kekacauan sosial di sejumlah Negara seperti Irak, Suriah, Lybia dan lain sebagainya. Agama Islam yang memiliki pemeluk kedua terbesar di dunia dianggap paling bertanggung jawab terhadap menguatnya radikalisme di kalangan pemeluk Muslim. Islam sebagai sebuah agama diyakini memiliki keuniversalan ideologi yang bisa menciptakan komunitas Muslim homogen. Jika asumsi ini dipakai, maka apa yang terjadi di Irak dan Suriah, bisa terjadi di Indonesia sebab ketiga Negara ini sama-sama memiliki komunitas Muslim terbesar.

Dengan demikian, komunitas Muslim radikal di Suriah dan Irak bisa muncul di Indonesia. Namun, sebagaimana dikatakan oleh Azra (2006 :XV) bahwa Islam pada tataran ideologi dan simbolik memang bersifat universal dan homogen, namun pada tataran empirik, ia sangat heterogen. Islam

sebagai ideologi memiliki nilai universal namun ketika ia bergulat dalam kehidupan sosial masyarakat, sifat universalitas Islam ternyata mengalami reduksi seiring perbedaan sosial, budaya dan gaya hidup. Tidak heran jika makna simbolik radikalisme akan ditafsirkan secara berbeda-beda oleh masyarakat Muslim tergantung latar belakang sosial, budaya, dan lain sebagainya. Radikalisme bagi sebagian Muslim adalah implikasi dari wujud kesalehan, sementara Muslim yang lain berpandangan bahwa kesalehan tidak bermuara pada radikalisme.

Tidak heran jika selama ini ada pemahaman yang keliru di kalangan sarjana yang menggeluti masyarakat Muslim dan para politisi Barat yang cenderung sulit membedakan antara Muslim yang saleh dan radikal. Kencenderungan yang nampak di permukaan adalah tingginya kecurigaan mereka terhadap kaum Muslim yang memiliki hasrat meningkatkan level kesalehan dalam mengamalkan agamanya. Sehingga sering kali ditemukan beberapa kasus di mana nama-nama seseorang yang identik dengan makna dan bertujuan untuk kesalehan seperti Ihsan, Muhammad dan lain sebagainya dicurigai sebagai Muslim radikal. Contoh lain adalah beberapa Negara yang phobia terhadap Muslim radikal mengetatkan pemeriksaan di imigrasi atau bahkan melakukan deportasi ketika menemukan seorang Muslim yang memakai busana Islam yang berciri khas sebagai Muslim saleh. Bahkan beberapa Negara melarang pemakaian busana Muslim seperti jilbab yang identik dengan kesalehan sebagai

seorang Muslim perempuan. Praktek-praktek beragama Islam pun yang bertujuan meningkatkan level kesalehan seorang Muslim dicurigai sebagai wahana serius menyebarkan virus radikalisme. Berbagai fenomena tersebut di atas merupakan bukti kesalahpahaman orang-orang tertentu dalam memaknai agama, khususnya Islam dalam kaitannya dengan radikalisme.

Namun perlu dicatat bahwa makna kesalehan di berbagai konteks sosial sangat relatif dan abstrak. Hal ini dipengaruhi oleh aliran dan Mazhab serta penggunaan sumber-sumber otoritatif dalam implementasi pengamalan agama dan penafsiran makna kesalehan. Menurut beberapa sarjana Barat, di Indonesia, pengaruh adat istiadat cukup berperan dalam menafsirkan makna kesalehan. Di beberapa lokasi di pedesaan, makna kesalehan lebih kuat bernuansa percampuran antara pengamalan agama dan adat. Trouwborst (19:675) mengutip pendapat Snouck Hurgronje mengatakan “ according to Snouck Hurgronje...without denying and even insisting that Indonesians were convinced Muslims, Islam had exercised only a limited influence on their lives”(Menurut Snouck Hurgronje tanpa menafikan dan bahkan mendesak bahwa orang Indonesia adalah Muslim, Islam tidak banyak mempengaruhi kehidupan mereka) Tambahan lagi, dewasa ini, dengan globalisasi media semakin menguat, maka makna kesalehan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya luar seperti nilai modernitas. Dengan demikian, makna kesalehan dinegoisasi

oleh tidak hanya Islam dan adat istiadat, namun juga oleh budaya global, khususnya nilai-nilai modernitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Jakarta (Jamhari & Jajang Jahroni, 2004 :212) menunjukkan bahwa, dari segi praktek pengamalan agama di Indonesia, khususnya agama Islam, Muslim di Indonesia bisa dikategorisasikan sebagai Muslim saleh (pious Muslim). Hal ini bisa dilihat dari tingginya presentase pengamalan agama Islam yang bersifat *sunnah*. PPIM menunjukkan bahwa intensitas umat Islam yang melaksanakan ritual membaca al-Qur’an setelah shalat lima waktu cukup tinggi. Survey yang dilakukan pada tahun 2001 menunjukkan bahwa sebesar 60% Muslim membaca al-Qur’an setelah sholat lima waktu, survey tahun 2002 sebesar 57,8 %, dan pada tahun 2004 sebesar 56,8% (Jamhari & Jajang Jahroni, 2004 : 210). Secara kuantitatif, survey seperti itu berhasil memetakan praktek keagamaan yang mendukung kesalehan, walaupun ia tidak cukup berhasil menjelaskan secara detil pendapat individu Muslim dan gejala sosial yang nampak; mengapa dan bagaimana praktek pengamalan agama tersebut muncul.

Namun secara jelas aksi damai 212 yang lalu menampilkan betapa kesalehan telah ditampilkan secara publik dan terang-terangan. Hal ini berarti gerakan kesalehan telah bergerak dari arah wilayah privat ke arah ruang publik (publik sphere). Upaya penampilan kesalehan publik tersebut tentu perlu dianalisis gejala

apa dibaliknya. Secara sosiologis, peristiwa 212 merupakan gejala menguatnya konservatisme atau islamisme di Indonesia. Bahkan Greg Fealy mengatakan bahwa peristiwa 212 menandakan kemenangan Islam garis keras di Indonesia. Hal ini dikarenakan motor penggerak dari aksi damai 212 tersebut adalah kelompok Islam yang terkenal keras seperti FPI (Front Pembela Islam) dengan tokohnya, Habib Rizki Shihab.

Kesalahan agama yang selama ini dipahami oleh internal Muslim tidak selalu bermuara ke radikalisme seperti nampak terlihat dari wujud kesalahan ulama-ulama pondok pesantren di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Mereka menunjukkan peran dan fungsi sosial Islam yang positif. Dengan demikian fungsi Islam dirawat dan dikelola ke arah yang benar sebab setiap orang dalam masyarakat manapun di Indonesia masih mempercayai fungsi Islam dalam ranah yang sebenarnya.

Fungsi Sosial Islam

Dalam kajian sosiologi, Nottingham (2002:9) menjelaskan bahwa setidaknya ada dua fungsi pokok agama. Pertama, agama ikut membantu terciptanya sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Kedua, agama berperan vital dalam memberikan kekuatan memaksa yang memperkuat adat istiadat. Dengan demikian, agama secara fungsional menjaga ketertiban sosial dan keberlangsungan umat pemeluknya. Sehingga sangat sulit membayangkan jika tidak ada agama di

dunia ini. Agama memiliki aturan-aturan kebaikan yang sangat berguna bagi keamanan dan ketertiban umum. Agama menjaga hubungan sosial antar manusia dan manusia dengan alam. Dengan demikian, agama turut serta dalam menjaga harmoni sosial dan harmoni alam semesta. Namun, Agama juga berpotensi membuat kekacauan sosial.

Dalam konteks itu, Islam bisa berfungsi ganda bagi pemeluknya. Di satu sisi ia jelas berperan penting dalam kehidupan sosial pemeluknya. Tuntutan agama Islam untuk menyantuni anak yatim dan orang miskin sangat berguna bagi pemerataan ekonomi dan keadilan social. Dalam konteks bernegara, Islam memiliki kontribusi besar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa pra-kemerdekaan, jihad terhadap kolonialisme Belanda yang didengungkan oleh Ulama-Ulama seperti KH. Hasyim Asy'ari berperan penting dalam membakar spirit rakyat untuk menumbangkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Agama Islam yang dipeluk mayoritas Muslim menjadi dinding pemisah dengan kolonial Belanda yang beragama Kristen. Harry J. Benda (1958: 338) mengatakan

“ ever since the arrival of the Dutch East India Company in Southeast Asia at the turn of the seventeenth century, the Dutch had encountered Muslim hostility in Indonesia. Time and again, the consolidation of their expanding power was threatened by local outbreaks of Islamic-inspired resistance...”

(Semenjak kedatangan perusahaan kolonial Belanda ke Asia Tenggara pada abad ke-17, Belanda menghadapi kebencian dari kaum Muslim Indonesia. Bersamaan dengan waktu, konsolidasi kekuasaan Belanda diancam oleh pemberontakan lokal yang terinspirasi oleh Islam)

Islam juga berperan penting dalam penyokong ketertiban moral di kalangan anak muda Muslim. Para pengajar Islam tidak pernah berhenti menyuarakan pentingnya moralitas bagi stabilitas mental dan pertahanan kuat bagi demoralisasi yang digencarkan oleh media dan saluran budaya lainnya. Isu-isu free-sex dan narkoba ditanggapi dengan serius oleh para orang tua dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi pengajaran dan pendidikan moral yang bersumber pada ajaran Islam. Islam berfungsi sebagai obat yang dianggap efektif bagi demoralisasi di kalangan anak muda Muslim.

Tidak heran jika Islam di Indonesia secara sosial berfungsi memperkuat penanaman nilai-nilai moral di kalangan anak muda Muslim. Program Maghrib Mengaji misalnya diharapkan menangkalkan perilaku anak muda Muslim yang suka 'berkeliraran' tidak tentu arah di jalan-jalan yang berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang seperti minum alkohol dan lain sebagainya. Di samping itu, Islam juga berfungsi sebagai perekat relasi dan harmoni sosial. Masjid-masjid tidak hanya digunakan sebagai ibadah individual namun juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial sesama

Muslim melalui acara-acara 'wirid' (semacam majlis taklim).

Acara wirid biasanya diadakan tiga kali dalam seminggu dengan mengundang penceramah agama. Di tengah gempuran globalisasi yang mendorong manusia untuk nyaman hidup independen dan individualistik, Islam berfungsi sebagai ideology yang memediasi budaya independen dengan budaya lokal yang cenderung bersifat komunal. Sehingga tidak jarang, kehidupan sosial Muslim di perkotaan Indonesia bercorak semi-individualistik atau semi-komunal. Ini menandai pergulatan antara modernism via globalisasi dan budaya lokal plus Islam. Kegiatan dakwah Islam di Masjid menandai dua hal. Pertama, ia berfungsi sebagai ajang pertemuan dan interaksi sosial. Nottingham (2002:2) mengatakan "*Beribadat bersama-sama-bersama-sama memakai lambang-lambang keagamaan-telah mempersatukan kelompok-kelompok manusia dalam ikatan yang paing erat*".

Kedua, ia bagi sebagian orang atau sekelompok orang berfungsi sebagai symbol kesalehan. Walaupun sebenarnya, mereka yang tak ikut kegiatan tersebut juga punya alasan religious juga. Hal ini dikarenakan agama tidak semata-mata kegiatan komunal. Bahkan Alfred North Whitehead (2009 :4) mengatakan bahwa agama adalah kesendirian. Baginya, orang yang tak pernah sendiri sesungguhnya tak pernah religius.

Berdasarkan pendapat Whitehead tersebut perlu kiranya ditarik penafsiran bahwasanya kesalehan yang berujung kepada radikalisme bisa jadi karena

ibadah-ibadah komunal di tempat ramai yang selama ini dilakukan tidak diimbangi dengan ibadah individual di tempat sepi. Padahal wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berada di tempat sunyi dan sepi, Gua Hira. Ibadah-ibadah yang bersifat *privacy* penting didorong untuk dilatih dan dibiasakan oleh komunitas Muslim. Tidak heran jika dalam ajaran Islam ibadah shalat *Tabajjud* di tengah malam yang sunyi sangat dianjurkan. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah yang sendiri dan di tempat sunyi penting bagi peningkatan kesalehan seorang Muslim. Namun, dalam konteks Indonesia, gejala yang nampak adalah semakin menguatnya kesalehan yang bersifat publik ketimbang privat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebangkitan atau kemunculan budaya populer di Indonesia akibat dari globalisasi dan media.

Aksi 212, Budaya Populer dan Prospek Toleransi Agama

Aksi damai 212 setidaknya memiliki bermacam interpretasi. Pemilihan waktu pada tanggal itu mirip angka yang identik dengan sebuah tokoh fiktif populer, Wiro Sableng. Simbol 212 dengan demikian digunakan sebagai daya tarik populer ketimbang nilai sakral. Kedua, aksi damai yang diusung bertepatan dengan hari Jum'at. Simbol ini lebih kuat bernilai sacral sebab Jum'at merupakan hari yang paling dihormati dalam Islam. Di samping itu, alasan dipilih hari Jum'at juga berdimensi religious. Hal ini karena pada hari itu ada ibadah sholat Jum'at yang diselenggarakan secara berjamaah.

Oleh karena itu, peristiwa itu dimaknai sebagai perkawinan atau hybriditas budaya populer dan Islam. Budaya populer dalam konteks ini diwakili oleh pemilihan simbol 212. Strinati (1995:2) mengatakan : "This meant that...it also 'carries two older senses: inferior kinds of work (cf. popular literature, popular press as distinguished from quality press); and work deliberately setting out to win favour (popular journalism as distinguished from democratic journalism, or popular entertainment); as well as the more modern sense of well liked by many people'"(Hal ini berartibudaya populer mengandung dua makna ; sejenis karya yang bermakna inferior (seperti literatur-literatur populer, press yang populer yang dibedakan dengan press yang berkualitas); dan karya yang memang bertujuan untuk menyenangkan (jurnalistik populer yang dibedakan dengan jurnalistik demokratis, atau hiburan populer); dan juga pengertian yang lebih modern 'yang disukai oleh banyak orang'.)

Budaya populer ditujukan untuk menyenangkan (to entertain) banyak orang. Budaya populer tidak mementingkan kualitas karya yang dihasilkan makanya dalam karya-karya seni, budaya populer diidentikan dengan karya-karya rendahan yang tidak mementingkan kualitas seperti novel seri silat Wiro Sableng 212. Budaya populer juga membutuhkan panggung pertunjukan untuk mengajak sebanyak orang terlibat. Sinetron misalnya sangat berkaitan dengan pertunjukan.

Pertunjukan hakekatnya menekankan pentingnya selera masyarakat. Para aktor atau pemeran dalam sinetron, produser, sutradara, dan semua yang terlibat dalam pembuatan sinetron dipastikan menempatkan masyarakat atau audience sebagai bagian penting dalam menentukan sinetron seperti apa yang akan dibuat dan dikonsumsi oleh mereka. Unsur-unsur yang sekiranya bisa membuat mereka senang akan dimasukkan dalam sinetron. Motif dibalik itu bisa saja adalah motif ekonomi. Semua yang terlibat dalam sinetron menginginkan keuntungan ekonomi dari ditayangkannya drama televisi tersebut. Semakin banyak masyarakat yang suka terhadap sinetron yang dibuat akan berdampak baik bagi keuntungan ekonomi mereka. Hal ini disebabkan sinetron yang disukai penonton akan berdampak pada banyaknya iklan yang masuk. Semakin banyak iklan semakin menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam produksi sinetron tersebut.

Pertunjukan dalam bentuk apapun mengandaikan pentingnya media sebagai sarana, sekalipun pertunjukan tersebut dalam bentuk paling sederhana (Imron Rosidi : 2016). Media berperan sebagai instrumen atau alat untuk ‘mempertunjukan’ sesuatu yang ingin ditampilkan di depan masyarakat luas. Dalam bentuk yang paling sederhana, pertunjukan ditujukan untuk menjangkau publik sebanyak-banyaknya. Orasi atau pidato seorang kandidat kepala daerah membutuhkan media penguat suara, panggung dan ornamen-ornamen yang sekiranya dianggap menarik bagi

masyarakat. Media juga bisa berbentuk konvensional seperti spanduk, baliho dan brosur-brosur. Semakin besar pertunjukan semakin aneka warna media yang digunakan sekaligus juga semakin banyak media yang dipakai. Media-media ini tentu berperan penting bagi pertunjukan sebab sebagian besar isi media adalah pertunjukan (Imron Rosidi: 2016).

Tidak heran jika peristiwa aksi damai 212 itu juga bisa dimaknai sebagai pertunjukan kesalehan publik umat Islam Indonesia. Kesalehan yang membutuhkan wahana pertunjukan sebab aksi itu memang membutuhkan ‘dukungan’ banyak orang untuk membangkitkan semangat kesalehan umat Islam. Media massa berupa Koran dan televisi terlibat sebagai media penting dalam pertunjukan tersebut. Di balik layar media Koran dan televisi di dalamnya ada pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, dan lain-lain. Di dalam berita, di dalamnya ada pelaku penting seperti pemimpin aksi dan peserta aksi. Media televisi mengambil gambar secara *live* peristiwa khotbah Jum’at dengan khatib Habib Rizieq Shihab. Televisi juga menampilkan gambar Presiden Jokowi duduk mendengarkan khotbah tersebut. Panggung pertunjukan yang elegan yang mungkin sangat jarang kita temukan dalam peristiwa lain; seorang tokoh Islam ‘keras’ memberikan ‘ceramah’ di depan seorang Presiden yang sering diidentikan ‘kurang membela’ kelompok Islam ini. Tampilan berita dalam bentuk ‘breaking news’ yang menunjukkan gambaran langsung dari lapangan Monas adalah budaya populer. Berita-berita tersebut

dikemas dengan bahasa yang menarik diselingi dengan gambar yang menarik pula. Dalam budaya populer, kualitas berita seringkali mengalah dengan hal-hal lain seperti politisasi dan komersialisasi berita. Dengan demikian, pemberitaan aksi tersebut secara besar-besaran bisa dimanfaatkan sebagai alat apapun; propaganda politik ataupun pencari profit sebesar-besarnya.

Dalam konteks itu, pertunjukan melalui televisi sangat berguna sebab televisi mampu menampilkan visualisasi yang hidup seperti realitas sosial. Apalagi Televisi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sen dan Hill (2000: 132) menyatakan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang menonton televisi dari pada membaca Koran dan majalah. Sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia banyak dihabiskan berjam-jam di depan layar televisi.

Kenyataan sosial tentang pertunjukan aksi damai 212 melalui media televisi itu membuktikan signifikansi budaya populer yang telah memasuki berbagai ranah sosial kehidupan masyarakat. Apa yang ditampilkan oleh televisi sebenarnya adalah hal yang lumrah. Namun sebagaimana peristiwa pertunjukan politik, apa yang diperlihatkan oleh peserta aksi adalah bagaimana caranya bisa mengambil hati masyarakat Muslim Indonesia umumnya dan khususnya Presiden Jokowi. Cara-cara yang sekiranya bisa membuktikan ketulusan hati mereka dilakukan dengan menampilkan busana Muslim dan

membawa sajadah. Dengan demikian aksi damai 212 adalah, pertama, pertunjukan Islam yang menggunakan budaya populer atau sebaliknya pertunjukan budaya populer yang menggunakan simbol-simbol Islam. Sebagaimana diketahui mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim sehingga identitas agama ini menjadi parameter penting dalam setiap pertunjukan budaya populer.

Kedua, sejatinya, perkawinan atau hibriditas budaya populer dan Islam dalam aksi damai tersebut mempertunjukkan identitas keislaman dalam konteks sosial masyarakat Islam Indonesia yang sedang mengalami gejala post-Islamisme. Istilah ini diperkenalkan oleh Asef Bayat yang kemudian dikutip oleh Ariel Heryanto (2015 :59) sebagai sebuah keadaan yang “tidak anti-Islam, tak juga non-Islami, dan tidak juga sekuler”.

Oleh karena itu, peristiwa tersebut, walaupun sebagian orang mengatakan sebagai kebangkitan Islam politik atau gejala penguatan Islam politik, adalah tak lebih dan kurang sebagai peristiwa yang tidak menyentuh substansi Islam politik. Apalagi isu-isu keislaman yang diusung oleh mereka tidak diikuti upaya yang serius untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia. Yang jelas terlihat adalah fenomena kesalehan yang bergerak dari wilayah privat ke publik sebagaimana fenomena shalat Jum'at yang disiarkan langsung di TVRI setiap minggu sekali.

Dengan demikian, istilah Post-Islamisme mungkin tepat digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial

tersebut. Secara sekilas aksi tersebut seolah-olah merupakan kebangkitan Islam politik yang membahayakan toleransi beragama di Indonesia. Namun peristiwa tersebut jelas merupakan sebuah anti-klimaks dari upaya Islam politik yang tak pernah berhasil dilakukan dan diwujudkan dalam masyarakat Indonesia.

Secara historis, upaya-upaya memperjuangkan Islam politik memang belum pernah berhasil dalam konteks Indonesia. Partai politik Islam seringkali menemui kegagalan ketika mereka mencoba mengusung penerapan menerapkan Islam sebagai dasar Negara. Inilah yang menurut Asef Bayat yang dikutip oleh Ariel Heryanto (2015 : 59) sebagai “ mengacu kepada kondisi sosial dan politik dimana-sesudah fase eksperimentasi-daya tarik, energy, dan sumber daya Islamisme telah terkuras habis, bahkan para pengikut yang tadinya bersemangat”.

Dengan demikian, aksi damai 212 tidaklah mengancam propek toleransi beragama di Indonesia sebab secara kategoris dalam aksi tersebut setidaknya ada tiga kelompok di dalamnya. Pertama adalah kelompok Islam yang memang murni atau ‘pure’ merasa tersinggung dengan ucapan Basuki Thahaja Purnama. Mereka rela datang dari berbagai daerah ke Jakarta untuk menunjukkan kepada pemerintah khususnya Presiden rasa sakit hati mereka terhadap ucapan Ahok. Kelompok ini sangat dominan dan mayoritas dalam aksi 212 itu. Mereka tidak memiliki agenda apapun selain

memang untuk menunjukkan rasa kesalehan mereka terhadap Islam.

Kelompok kedua adalah kelompok yang memiliki agenda khusus di balik aksi tersebut. Mereka memanfaatkan aksi ini sebagai alat atau saluran untuk agenda Islamisasi yang lebih luas. Mereka sejak lama bercita-cita mengusung Islamisasi Negara atau menerapkan Syariat Islam di berbagai lini kehidupan masyarakat Indonesia. Kelompok ini jelas ingin menghidupkan Islam politik di Indonesia. Tipikal kelompok ini adalah berpaham radikal. Motor utama kelompok ini adalah FPI (Front Pembela Islam).

Organisasi ini dikenal sebagai kelompok Islam yang peling getol mengupayakan penerapan syariat Islam di Indonesia. Ciri khas mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Jamhari dan Jajang Jahroni (2004 : 29) adalah berpakaian putih, celana panjang putih selutut seperti yang dikenakan orang-orang Timur Tengah dan kepala mereka ditutupi dengan surban putih.

Kelompok ini memiliki identitas yang mudah dikenali bahkan sebagian dari mereka tidak jarang menggunakan simbol nama FPI di baju yang mereka kenakan. Sebagaimana seringkali diberitakan di media-media nasional, kelompok ini acap merusak tempat-tempat maksiat sebab bagi mereka tempat tersebut selayaknya tidak ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen kelompok ini untuk menegakan Islam di Indonesia.

Kelompok ketiga adalah kelompok yang menginginkan perubahan politik

atau ingin mengganti pemerintahan sekarang dengan pemerintahan yang baru. Kelompok ini sebenarnya tidak memiliki agenda Islamisasi Negara. Tujuan mereka tidak lebih didasari ketidakpuasan atas kondisi politik saat ini. Mereka dikendalikan oleh motif politik, bukan agama sebagaimana kelompok kedua.

Dalam bahasa pemerintahan sekarang, kelompok ini disebut hendak melakukan tindakan ‘makar’. Ciri-ciri mereka antara lain; mereka tidak memiliki sejarah atau latar belakang gerakan Islam politik, sebagian dari mereka tidak memiliki komitmen keislaman yang kokoh bahkan sebagian mereka justru tidak menyukai tindakan atau gerakan Islamisasi Negara yang dilakukan oleh FPI. Kelompok ini sebelum aksi 212 sudah pernah bergabung dalam aksi 4 November 2016.

Dalam aksi tersebut, kelompok ini memberikan orasi yang mengejutkan pihak pemerintah. Yang menarik adalah seperti Ahmad Dhani yang sebelum aksi 4 November 2016 adalah orang yang sangat tidak menyukai cara-cara yang dilakukan oleh FPI dalam melakukan pengrusakan terhadap tempat-tempat maksiat. Bahkan sebelum peristiwa ini, Ahmad Dhani adalah tokoh antagonis bagi FPI. Peristiwa ini telah berhasil mendamaikan Ahmad Dhani dan FPI.

Dari kategorisasi yang disampaikan di atas, nampaknya aksi damai 212 dan aksi-aksi sebelum dan sesudahnya tidaklah mengancam toleransi beragama di Indonesia. Hal ini dikarenakan, pertama, kelompok pertama sangatlah

dominan dibandingkan kelompok kedua. Walaupun motor penggerak gerakan-gerakan tersebut adalah kelompok kedua, namun kelompok pertama tidak atau akan sulit sekali diajak untuk memiliki atau tertarik dengan ideologi Islam kelompok kedua. Hal ini ditulis oleh Greg Fealy (2016):

“saya kebetulan berada di dekat kendaraan Habib Rizieq ketika ia pertama kali memasuki Medan Merdeka dan pendukungnya memadati untuk menyambutnya dan mendapatkan berkahnya. Banyak peserta menghargai usahanya untuk menekan pemerintah tentang isu Ahok tetapi mengatakan mereka tidak biasa mengikuti khotbah-khotbahnya. Beberapa mengatakan bahwa mereka tidak menyetujui pernyataan kasar dan “kebiasaan main hakim sendiri” tetapi tetap datang karena mereka berpikir bahwa semua Muslim harus bergabung dalam menentang penistaan agama.

Seorang wanita dari NU menyatakan: “Saya di sini untuk membela Islam dan Al-Qur’an dari penghinaan. Tetapi saya tidak mendukung FPI atau HTI.” Secara keseluruhan, peserta tampak kurang peduli tentang siapa yang mengorganisir demonstrasi dibanding pesan yang diusahakan untuk disampaikan kepada pemerintah tentang Ahok”

Kedua, peristiwa aksi damai 212 dan peristiwa sebelum dan sesudahnya

adalah peristiwa yang berkaitan dengan religiusitas atau kesalehan, bukan signal menguatnya radikalisme Islam. Dalam konteks Indonesia, gerakan-gerakan Islam dengan cara-cara radikal masih minoritas. Sebagaimana besar umat Islam Indonesia masih memiliki pandangan bahwa cara-cara radikal seperti yang dilakukan oleh FPI adalah kurang tepat. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa peristiwa itu menguntungkan gerakan kelompok kedua sebab tokoh kelompok ini kemudian populer dan dikenal publik Indonesia secara luas. Apakah popularitas tersebut akan menaikkan simpati masyarakat muslim dengan FPI? Tidak akan mudah menjawab pertanyaan tersebut sebab simpati publik terhadap gerakan ini mungkin tidak sama dengan simpati mereka terhadap gerakan-gerakan Islam radikal kelompok ini.

Ketiga, prospek toleransi agama di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh gerakan-gerakan atau aksi-aksi seperti itu. namun sebagai sebuah gerakan yang diikuti massa yang sedemikian besar, ada yang mencatat 1 juta orang ada yang mengatakan 500.000 sampai 750.000 orang, peristiwa itu mengagetkan semua pihak. Namun, prospek toleransi agama di Indonesia tidak akan terancam dengan gerakan-gerakan seperti itu sebab Islam yang *mainstream* masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi agama sebagaimana tertuang dalam *Bhineka Tunggal Ika*. Lebih jauh lagi, gerakan-gerakan seperti itu akan sangat sulit terulang sebab momentum isu tersebut arahnya akan semakin berkurang seiring perkembangan hukum Ahok.

Penekanan dari kelompok *Mainstream* seperti NU (Nahdlatul Ulama) tentang pentingnya menjaga kepercayaan terhadap hukum di Indonesia memastikan bahwa apapun keputusan pengadilan seharusnya diterima kelompok Muslim.

Keempat, sebagai sebuah gerakan yang tidak lepas dari unsur budaya populer, maka gerakan-gerakan seperti itu tidak memiliki efek signifikan bagi arah Islamisasi Negara di Indonesia. Budaya populer adalah budaya yang cenderung berjangkawaktu singkat dan dampaknya tidak besar bagi perubahan sosial (Chua, 2012: 326). Islamisasi Negara membutuhkan gerakan kontinyu dan gerakan yang serius. Kadangkala ia membutuhkan waktu yang lama. Bahkan dalam konteks Indonesia, gerakan-gerakan yang lebih serius sudah pernah dilakukan dan terbukti belum berhasil, apatah lagi gerakan ini yang tidak steril dari budaya populer.

Kesimpulan

Selama ini ada pandangan yang keliru dari sebagian orang tentang radikalisme dan kesalehan. Kadangkala mereka gagal memahami perbedaan keduanya. Gejala kesalehan seringkali ditafsirkan sebagai gejala radikalisme. Munculnya aksi belas Islam sebagai respon atas komentar Ahok dikhawatirkan sebagai kemenangan radikalisme Islam di Indonesia yang pada gilirannya mengancam toleransi beragama di Indonesia. Namun sebagaimana dibahas dalam tulisan ini, gerakan aksi

bela Islam yang puncaknya terjadi pada tanggal 2 Desember 2016 di lapangan Monas itu adalah gejala kesalehan yang *hybrid* dengan kapitalisme, politik dan budaya populer. Aksi itu menjadi contoh sempurna perkawinan antara kapitalisme dan Islam sebab aksi itu dimanfaatkan sebagai wahana penting mempromosikan produk-produk tertentu seperti sebuah produsen busana Muslim terkenal yang sengaja mengirimkan pesan melalui SMS ke konsumen dengan menawarkan produk diskon sekian persen dengan brand “promo Aksi Bela Islam jilid III”.

Ia juga berkelindan dengan politik sebab sebagaimana diberitakan di media *mainstream*, aksi itu telah dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk saluran atau alat menggulingkan kekuasaan pemerintahan sekarang. Disamping itu, kelompok tertentu juga memanfaatkan momentum aksi bela Islam ini sebagai wahana penting mengusung kembali isu lama; Islamisasi Negara dengan mengganti konstitusi dengan Islam. Sebagaimana peristiwa lain, ketika ia ditampilkan melalui media, maka ia tidak bisa lepas dari pengaruh budaya populer. Tidak aneh jika setelah aksi Bela Islam ini muncul di televisi nasional *hashtag* baru “aksi bela Timnas 1712” ketika televisi itu menyiarkan siaran langsung pertandingan final piala AFF.

Hashtag itu bertujuan memberikan daya tarik dan pesona untuk meningkatkan semangat nasionalisme massa. Seolah-olah televisi itu ingin secara murni membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia

namun jika diteliti lebih dalam, ternyata di belakangnya terdapat motif ekonomi. Televisi itu ingin ‘menunggangi’ spirit nasionalisme dengan kepentingan ekonomi sebab semakin banyak orang menonton siaran langsung pertandingan final itu, maka semakin besar *rating* acara itu yang bergaris lurus dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh.

Demikian juga aksi bela Islam tersebut telah dimanfaatkan oleh media nasional sebagai bahan berita utama yang bertujuan menarik minat orang banyak. Semakin besar jumlah orang menyaksikan aksi itu melalui media televisi, maka semakin besar keuntungan ekonomi media tersebut. Setiap acara-acara yang secara simbolik sekilas Islami, namun hakekatnya ketika sudah ditampilkan melalui media televisi, ia sudah tidak bisa secara murni ditafsirkan sebagai acara yang ‘pure’ Islami. Inilah yang diistilahkan dalam kalangan sarjana sebagai komodifikasi Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aksi bela Islam, yang terdiri dari beberapa jilid itu, adalah tidak mengancam toleransi beragama di Indonesia. Ia tidak ada kaitannya dengan menguatnya konservatisme Islam atau gerakan anti kelompok minoritas. Gerakan itu hanya akumulasi dari gejala menguatnya kesalehan publik masyarakat Islam. Kesalehan publik berbeda dengan kesalehan privat. Yang pertama biasanya *hybrid* dengan elemen-elemen khas modernitas seperti kapitalisme, politik dan budaya populer sementara yang

kedua biasanya lebih bebas dari unsur-unsur tersebut.

Tambahan lagi, radikalisme Islam sebagai sebuah gerakan yang membahayakan toleransi beragama di Indonesia sama sekali tidak nampak dalam aksi tersebut. Walaupun motor penggeraknya adalah kelompok Islam radikal, namun mayoritas pesertanya adalah kelompok arus utama Islam yang tidak memiliki agenda Islamisasi Negara atau merubah konstitusi Negara Indonesia. Mayoritas peserta aksi secara murni dan tulus ikut serta kegiatan itu karena dorongan 'kesalehan' untuk meminta keadilan hukum bagi sang 'penista agama'. Gerakan aksi bela Islam itu tidak bisa ditafsirkan sebagai gerakan membenci kelompok minoritas.

Daftar Kepustakaan

- Benda, Harry.J.,(1958). "Christian Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia", in *The Journal of Modern History*, 30 , h.338-347
- Chua Beng Huat (2012) " Doing Pop Culture Studies in East Asia" dalam Zawawi Ibrahim (ed.) *Social Science and Knowledge in a Globalising World*. Petaling Jaya : Strategic Information and Research Development Centre & Persatuan Sains Sosial Malaysia
- Fealy, Greg, (2016), *Bukan Sekedar Ahok : Menjelaskan Aksi Massa Pada 2 Desember*, diakses di www.indonesiaatmelbourne.com pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 15.00 WIB.
- Jamhari & Jajang Jahroni. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, RajaGrafindo : Jakarta
- Nottingham, Elizabeth K, (2002). *Agama dan Masyarakat : Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, terj.Abdul Muis Naharong, RajaGrafindo : Jakarta
- Pepinsky, Thomas.B. (2016). *Measuring Piety in Indonesia*, presented in Conference on the Political Economy of Islam and Muslim Societies, 16 April 2016
- Pusat Bahasa Depdinas RI. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Depdiknas : Jakarta
- Rosidi, Imron. (2016). "Media dan Politik : Pemilu sebagai Budaya Populer di Indonesia" dalam *Media dan Politik*, ed. M. Badri, Pekanbaru : ASPIKOM
- Suransky, Caroline. (2012). *Editor's Preface in Contesting Morality : Youth*

Piety and in Indonesia, Pluralism
Working Paper 10

Trouwborst, Albert, *Anthropology, the Study of Islam, and Adat Law in the Netherlands and Netherlands East Indies, 1920-1950* in *Tales from Academia-Part II*

Whitehead, Alfred N (Terj. Alois Agus Nugroho), 2009. *Mencari Tuhan Sepanjang Zaman :dari Agama Kesukuan hingga Agama Universal*, Mizan : Bandung